

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Analisis Pengelolaan Belanja Modal pada Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Belanja Modal pada Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:
 - a. Belanja Tanah
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - e. Belanja Aset Tetap Lainnya
2. Pengelolaan Belanja Modal tahun anggaran 2015 mengalami penurunan pada belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan sedangkan kenaikan pada belanja aset tetap lainnya dibanding tahun sebelumnya, dengan rincian capaian kinerja belanja modal tahun anggaran 2014 dengan tahun anggaran 2015 sebagai berikut:
 - a. Capaian Kinerja Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014 ada penurunan sebesar 9.91 persen atau sebesar Rp 280.804.850,-.
 - b. Capaian Kinerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014 ada penurunan sebesar 12.41persen atau sebesar Rp 123.404.400,-.
 - c. Capaian Kinerja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014 ada kenaikan sebesar 8.616.15 persen atau sebesar Rp. 997.344.700,-.

3. Dalam pencatatannya belanja modal diberi perlakuan khusus dengan melakukan pencatatan secara *corollary*, yaitu dicatat dengan dua jurnal. Satu jurnal untuk mencatat belanja dan yang lainnya untuk mencatat asset yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut.
4. Hasil evaluasi pengelolaan belanja modal pada Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sudah cukup baik meskipun masih ada kekurangan dalam pencapaian kinerjanya disebabkan lemahnya cara pengelolaan belanja modal sehingga di tahun anggaran 2015 belanja modal mengalami penurunan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis akan mengemukakan saran kepada instansi sekiranya bermanfaat pengelolaan belanja modal pada Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sudah cukup baik dan harus dipertahankan oleh instansi dengan cara melakukan perencanaan, pengoorganisasian dan pengawasan yang tepat terhadap belanja modal pada instansi agar dapat tetap berjalan dengan lancar.

1. Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan belanja modal sebaiknya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi, untuk kegiatan yang produktif sehingga mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap keuangan daerah.
2. Sebaiknya instansi dapat mempertahankan kinerja terkini seperti pendampingan penatausahaan keuangan agar setiap SKPD/dinas lebih mandiri dalam mengelola keuangan pemerintah daerah dan system akuntansi tetap berjalan dengan baik.
3. Untuk ke depannya sebaiknya instansi semakin intensif melakukan pembinaan pengelolaan keuangan dan menambah program dan kegiatan kerja yang dapat meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
- D., Prastowo Dwi dan Rifka Juliaty. 2008. *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi (edisi kedua)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks Cipta
- Erlina, dkk. 2012. *Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Medan: USU Press
- Ghozali, Imam dan Dwi Ratmono. 2008. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah (edisi revisi)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Halim, Abdul. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah (edisi ketiga)*. Jakarta: Salemba Empat
- Moekijat. 1989. *Manajemen Kepegawaian (cetakan ketujuh)*. Bandung: Mandar Maju
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 2 Tentang Laporan
Realisasi Anggaran

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi
Anggaran

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan

Prabu Mangkunegara, A.2010. *Evaluasi Kinerja SDM (cetakan kelima)*.
Bandung:PT Refika Aditama

Reksopoetranto, S. 1992. *Manajemen Proyek Pembangunan*. Jakarta: FE
UI

Swastha, Basu dan Irawan. 2007. *Manajemen Pemasaran Modern*
(*cetakan kelima*). Yogyakarta: Liberty

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara